

BIAS ORIENTALISME DALAM JURNALISME TELEVISI: KRITIK ATAS REPRESENTASI PESANTREN DI MEDIA MAINSTREAM

Anjaha Naufal Muhammad¹, Wifdatun Nisa²

^{1,2} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

anjahanaufal24@gmail.com¹, wifdatunnisa57@gmail.com²

ABSTRACT

This study examines the manifestation of internal orientalism bias in Indonesian television journalism, with a focus on how pesantren (Islamic boarding schools) are systematically misrepresented by urban-centric mainstream media. Using Critical Discourse Analysis (CDA) and framing analysis as the primary methodological frameworks, this research critically investigates the controversy surrounding TRANS7's program "Xpose Uncensored" (aired October 13, 2025), which triggered widespread protests from thousands of santri (Islamic students) and drew formal sanctions from the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) following its distorted portrayal of Pondok Pesantren Lirboyo and its religious leader, KH Anwar Manshur. Drawing on Edward Said's theory of orientalism and Stuart Hall's , encoding/decoding model, this study argues that Indonesian television journalism reproduces a form of internal orientalism, wherein urban media elites position themselves as the rational, modern subject while constructing pesantren as an exotic, feudalistic, and suspicious Other. The findings reveal that rating-driven logic and the commodification of religious symbols lead to the systematic violation of journalistic principles, including balance, accuracy, and cultural sensitivity. The study further demonstrates that the pesantren community's organized resistance, manifested through social media boycotts and legal actions, constitutes a form of oppositional reading that challenges mainstream media's narrative dominance. This research concludes that meaningful reform in Indonesian broadcasting ethics requires not only regulatory enforcement by KPI but also a fundamental epistemological shift in how journalists perceive and report on religiously and culturally distinct communities.

Keywords: *orientalism bias, television journalism, pesantren representation, media framing, critical discourse analysis, Indonesian broadcasting ethics*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji manifestasi bias orientalisme internal dalam jurnalisme televisi Indonesia, dengan fokus pada bagaimana pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan dikonstruksi secara sistematis oleh media mainstream yang berpusat di wilayah urban. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) dan analisis framing sebagai kerangka metodologis utama, penelitian ini secara kritis menelaah kontroversi program "Xpose Uncensored" milik TRANS7 yang ditayangkan pada 13 Oktober 2025, yang memicu gelombang protes ribuan santri dan berujung pada sanksi resmi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akibat representasi yang distortif terhadap Pondok Pesantren Lirboyo dan pengasuhnya, KH Anwar Manshur. Berlandaskan teori orientalisme Edward Said dan model , *encoding/decoding* Stuart Hall, penelitian ini

berargumen bahwa jurnalisme televisi Indonesia mereproduksi bentuk orientalisme internal, di mana elit media urban memosisikan diri sebagai subjek yang rasional dan modern, sementara pesantren dikonstruksi sebagai Liyan (The Other) yang eksotis, feodalistik, dan mencurigakan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa logika rating dan komodifikasi simbol-simbol keagamaan mendorong terjadinya pelanggaran sistemik terhadap prinsip-prinsip jurnalistik, meliputi keberimbangan, akurasi, dan sensitivitas budaya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa resistensi terorganisir komunitas pesantren, yang termanifestasi melalui boikot di media sosial dan langkah-langkah hukum, merupakan bentuk pembacaan oposisional (oppositional reading) yang menantang dominasi narasi media mainstream. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi etika penyiaran di Indonesia tidak cukup hanya melalui penegakan regulasi oleh KPI, tetapi juga menuntut pergeseran epistemologis yang mendasar dalam cara pandang jurnalis terhadap komunitas yang berbeda secara budaya dan keagamaan.

Kata Kunci: bias orientalisme, jurnalisme televisi, representasi pesantren, analisis framing, analisis wacana kritis, etika penyiaran Indonesia

A. Pendahuluan

Lanskap media massa di Indonesia, khususnya televisi, memegang peran sentral sebagai institusi pembentuk kesadaran kolektif dan definisi realitas sosial (McQuail, 2010). Televisi bukan sekadar instrumen penyebaran informasi, melainkan medan di mana makna diproduksi, dipertukarkan, dan diperebutkan (Hall, 1997). Dalam proses ini, jurnalisme televisi sering kali terjebak dalam apa yang disebut sebagai bias orientalisme, sebuah kerangka pandang yang melihat kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini institusi pesantren, sebagai entitas yang "Liyan" (The Other), eksotis, tertinggal, atau bahkan mengancam nilai-nilai modernitas (Said, 1978). Fenomena ini menjadi

sangat krusial untuk dibedah ketika media mainstream yang berbasis di pusat-pusat urban (Jakarta-sentris) mencoba memotret realitas kehidupan tradisional-religius tanpa dibekali sensitivitas budaya yang memadai (Couldry, 2012).

Akar masalah dari bias representasi ini dapat ditarik dari pemikiran Edward Said mengenai Orientalisme (Said, 1978). Said menjelaskan bahwa Orientalisme adalah sebuah gaya berpikir yang didasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis antara "Timur" (Oriental) dan "Barat" (Occidental) (Said, 1978). Dalam konteks domestik Indonesia, terjadi apa yang bisa diistilahkan sebagai "Orientalisme Internal," di mana elit media urban memosisikan dirinya

sebagai subjek yang "modern" dan "rasional," sementara pesantren diposisikan sebagai objek yang "tradisional" dan "penuh misteri" yang perlu dibongkar melalui lensa jurnalistik yang sering kali bersifat sensasional (Heryanto, 2015). Jurnalisme televisi nasional sering kali gagal menangkap esensi pesantren sebagai institusi pendidikan asli Indonesia yang memiliki akar sejarah kuat dalam melawan penjajahan dan membangun karakter bangsa (Azra, 2012).

Ketegangan antara representasi media dan realitas pesantren mencapai titik didihnya pada pertengahan Oktober 2025. Program "Xpose Uncensored" yang ditayangkan oleh TRANS7 menjadi pusat kontroversi setelah menyiarkan konten yang dianggap menghina Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, beserta pengasuhnya, KH Anwar Manshur (KPI, 2025). Tayangan yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 tersebut memicu reaksi berantai yang masif, mulai dari aksi boikot di media sosial, unjuk rasa ribuan santri, hingga sanksi keras dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (KPI, 2025). Kasus ini bukan sekadar insiden keteledoran redaksi, melainkan cerminan dari

kegagalan sistemik jurnalisme televisi dalam memahami subbudaya yang berbeda dari norma urban-sekular yang mereka anut (Shoemaker & Reese, 2014).

Masalah utama dalam representasi jurnalisme televisi terhadap pesantren terletak pada ketiadaan prinsip keberimbangan (*cover both sides*) dan akurasi yang mendalam (Ward, 2005). Media cenderung menggunakan "logika rating" yang menghalalkan dramatisasi dan hiperbolisasi untuk menarik perhatian khalayak (McManus, 1994). Ketika institusi sakral seperti pesantren dibingkai dengan narasi kecurigaan, seperti tuduhan eksploitasi santri demi kekayaan kiai, media tidak hanya melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh agama, tetapi juga merusak harmoni sosial yang telah terjaga selama berabad-abad (Durkheim, 1912). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah mekanisme bias orientalisme dalam jurnalisme televisi, menganalisis dampak sosiologis dari distorsi representasi tersebut, dan merumuskan kritik atas etika penyiaran di Indonesia melalui studi

kasus kontroversi TRANS7 dan Pesantren Lirboyo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan fokus pada analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) dan analisis framing (Creswell, 2016; Fairclough, 1995; Entman, 1993). Penggunaan metodologi ini bertujuan untuk membongkar bagaimana realitas pesantren dikonstruksi dalam teks berita dan narasi televisi, serta mengidentifikasi kepentingan ideologis atau komersial yang bekerja di balik produksi pesan tersebut (Fairclough, 1995). Data utama penelitian ini berasal dari dokumen siaran program "Xpose Uncensored" TRANS7 edisi 13 Oktober 2025, pernyataan-pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dokumen sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta pernyataan sikap dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (KPI, 2025; PBNU, 2025).

Secara operasional, analisis dilakukan melalui tiga level yang saling terkait. Pada level mikro, penelitian ini menganalisis teks dan

narasi siaran, termasuk pilihan kata (diksi), metafora, serta penggunaan elemen visual yang membentuk makna tertentu dalam pemberitaan (Fairclough, 1995). Pada level mezo, kajian difokuskan pada proses produksi dan konsumsi pesan, di mana peneliti menelaah bagaimana model encoding (pengkodean) yang dilakukan oleh produser televisi sering kali tidak sejalan dengan model decoding (pembacaan) yang dilakukan oleh audiens pesantren, sebagaimana dijelaskan dalam teori Stuart Hall (Hall, 1980). Sementara itu, pada level makro, analisis diarahkan untuk menghubungkan teks media dengan konteks sosial-budaya serta struktur ekonomi-politik industri televisi di Indonesia yang sangat bergantung pada logika rating dan kepentingan pasar (Mosco, 2009).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan observasi terhadap perkembangan kasus di berbagai platform media (Sugiyono, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi komparatif dengan merujuk pada berbagai hasil penelitian sosiologis mengenai tradisi komunikasi dan realitas sosial di pesantren untuk menunjukkan adanya

kesenjangan antara "fakta lapangan" dan "fakta media" (Azra, 2012). Sebagai instrumen pendukung, peneliti memanfaatkan data valid yang bersumber dari laporan jurnalisisme serta rilis resmi lembaga berwenang guna memastikan akurasi informasi terkait kronologi kejadian, rincian tuntutan alumni, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pihak stasiun televisi (KPI, 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hegemoni Media dan Konstruksi Liyan: Analisis Kritis Orientalisme Internal dalam Representasi Pesantren di Jurnalisme Televisi Nasional

Lanskap jurnalisme televisi di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara idealisme informasi dan tekanan industri yang bersifat profit-sentris (Mosco, 2009). Sebagai institusi yang memiliki kekuatan untuk mengonstruksi realitas, televisi bukan sekadar medium penyampai pesan, melainkan medan pertempuran diskursif di mana makna diproduksi, dipertukarkan, dan dipaksakan kepada khalayak (Hall, 1997). Fenomena ini menjadi sangat krusial ketika media mainstream yang berbasis di pusat-pusat urban

(Jakarta-sentris) mencoba memotret realitas kehidupan tradisional-religius, seperti institusi pesantren, tanpa dibekali sensitivitas budaya yang memadai. Dalam konteks ini, jurnalisme televisi sering kali terjebak dalam apa yang diidentifikasi sebagai bias orientalisme internal, sebuah kerangka pandang yang melihat kelompok-kelompok tertentu sebagai entitas yang "Liyan" (The Other), eksotis, tertinggal, atau bahkan mengancam nilai-nilai modernitas (Said, 2016).

Akar masalah dari bias representasi ini dapat ditarik dari pemikiran Edward Said mengenai Orientalisme, yang menjelaskan gaya berpikir berdasarkan perbedaan ontologis dan epistemologis antara "Timur" dan "Barat" (Said, 2016). Dalam skala domestik, elit media urban memosisikan diri sebagai subjek yang "modern" dan "rasional", sementara pesantren diposisikan sebagai objek yang "tradisional" dan "penuh misteri" yang perlu dibongkar melalui lensa jurnalistik yang sering kali bersifat sensasional (Heryanto, 2015). Ketegangan ini mencapai titik didihnya pada pertengahan Oktober 2025 melalui program "Xpose Uncensored" di TRANS7, yang

memicu reaksi masif dari komunitas pesantren akibat representasi yang dianggap menghina Pondok Pesantren Lirboyo dan pengasuhnya, KH Anwar Manshur. Analisis komprehensif terhadap kasus ini memerlukan pembedahan melalui perangkat metodologis yang presisi, mencakup analisis framing Robert Entman, model encoding/decoding Stuart Hall, serta analisis wacana kritis pada level mikro, mezo, dan makro (Entman, 1993; Hall, 1980; Fairclough, 1995).

Implementasi Analisis Framing Robert Entman dalam Kasus Xpose Uncensored

Analisis framing merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain (Entman, 1993). Robert Entman mendefinisikan framing melalui empat elemen kunci: pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian (Entman, 1993). Dalam tayangan "Xpose Uncensored" edisi 13 Oktober 2025, keempat elemen ini digunakan untuk membingkai pesantren bukan sebagai lembaga pendidikan, melainkan

sebagai ruang feodalisme yang mencurigakan.

1. Pendefinisian Masalah: Konstruksi Keganjilan Tradisi Elemen pertama, Define Problems, menekankan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan (Entman, 1993). TRANS7 membingkai praktik tawadu' santri sebagai masalah sosial yang aneh. Melalui judul "Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?", media mendefinisikan kehidupan pesantren sebagai sebuah anomali yang tidak masuk akal dalam standar kehidupan modern. Masalah yang ditonjolkan bukan pada nilai filosofis di balik tindakan tersebut, melainkan pada aspek visual yang dianggap ekstrem dan tidak lazim bagi masyarakat urban.

Pemilihan isu ini menunjukkan adanya strategi penonjolan (salience) yang sengaja mengaburkan konteks pendidikan karakter di pesantren dan menggantinya dengan narasi keterbelakangan (Entman, 1993). Hal ini serupa dengan pola framing pada

kasus-kasus sensitif lainnya, di mana media cenderung memilih fakta-fakta yang kompleks dan menyederhanakannya menjadi masalah yang memicu emosi publik.

2. **Diagnosis Penyebab: Mistifikasi Kekuasaan Kiai**
Setelah mendefinisikan masalah, media melakukan *Diagnose Causes* untuk mengidentifikasi aktor atau faktor yang dianggap sebagai penyebab masalah (Entman, 1993). Dalam narasi TRANS7, penyebab dari "keganjilan" hidup di pondok didiagnosis sebagai akibat dari otoritas Kiai yang absolut dan sistem ekonomi pesantren yang dianggap eksploitatif. Kalimat narator, "Ketemu kiai-nya masih gesot dan cium tangan. Dan ternyata yang gesot itulah yang ngasih amplop," secara langsung menunjuk pada figur Kiai sebagai penyebab dari perilaku santri yang dianggap merendahkan martabat.

Diagnosis ini mengabaikan seluruh sistem kepercayaan sosiologis-religius yang mendasari hubungan guru dan murid di dunia pesantren. Media justru mendiagnosis

bahwa tradisi penghormatan tersebut hanyalah kedok untuk akumulasi kekayaan pribadi, sebuah tuduhan yang didasarkan pada spekulasi tanpa verifikasi yang mendalam.

3. **Penilaian Moral: Delegitimasi Etika Spiritual**
Elemen Make Moral Judgement digunakan untuk memberikan penilaian atau pembenaran atas argumen yang dibuat (Entman, 1993). TRANS7 menggunakan standar moral urban-liberal untuk mendelegitimasi praktik spiritual di Lirboyo. Tindakan santri berjalan jongkok dinilai secara moral sebagai bentuk perbudakan modern. Narasi yang menyatakan, "Netizen curiga bahwa bisa jadi inilah kenapa sebagian kiai makin kaya raya," merupakan instrumen untuk melegitimasi penilaian negatif media dengan mencatut suara anonim di media sosial.

Penilaian moral ini sangat berbahaya karena ia tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menyerang sistem nilai yang diyakini oleh jutaan santri. Dengan memberikan label moral "curiga" dan "eksploitatif", media secara efektif

melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh agama yang dihormati. Pola ini sering ditemukan dalam jurnalisme yang mengejar viralitas (McManus, 1994), di mana penilaian moral diberikan mendahului fakta yang tervalidasi.

4. Rekomendasi Penyelesaian: Sensasionalisme sebagai Solusi Elemen terakhir, Treatment Recommendation, menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan sebagai jalan keluar (Entman, 1993). Dalam konteks TRANS7, rekomendasi yang ditawarkan secara implisit adalah kebutuhan untuk "membongkar" apa yang mereka sebut sebagai sisi gelap pesantren melalui jurnalisme investigatif yang provokatif. Namun, alih-alih memberikan solusi informatif, rekomendasi ini justru lebih merupakan komodifikasi skandal demi mempertahankan rating program (Mosco, 2009).

Media seolah-olah memosisikan diri sebagai pahlawan yang mengungkap fakta rahasia, padahal yang dilakukan hanyalah dramatisasi atas realitas yang tidak dipahami konteksnya. Rekomendasi ini mencerminkan kegagalan media

dalam menjalankan fungsi edukasi dan justru terjebak dalam fungsi hiburan yang menyesatkan.

Analisis Wacana Kritis (CDA): Level Mikro, Mezo, dan Makro

Untuk memahami mekanisme kekuasaan di balik teks media, perlu dilakukan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) yang mencakup tiga level operasional (Fairclough, 1995; van Dijk, 1998). Pendekatan ini memungkinkan kita melihat bagaimana teks diproduksi dan bagaimana struktur sosial memengaruhi teks tersebut.

1. Level Mikro: Struktur Teks dan Kekerasan Linguistik
Pada level mikro, fokus analisis adalah pada struktur teks, pilihan kata (diksi), dan visual (Fairclough, 1995). Dalam tayangan TRANS7, penggunaan kata "ngesot" merupakan contoh nyata dari kekerasan linguistik. Dalam budaya pesantren, tindakan tersebut adalah laku tawadu' yang penuh dengan nilai adab dan kehormatan. Namun, dengan memilih kata "ngesot", media mereduksi nilai spiritual tersebut menjadi sebuah anomali fisik yang memprihatinkan.

Diksi "amplop" juga digunakan secara insinuatif untuk membangun narasi korupsi moral. Media tidak menggunakan istilah "bisyaroh" atau "tanda kasih" yang umum dalam tradisi keagamaan, melainkan memilih istilah yang secara konotatif sering dikaitkan dengan suap atau gratifikasi dalam konteks politik-ekonomi urban. Secara visual, penggunaan teknik framing yang mendramatisasi posisi tubuh santri di bawah kiai bertujuan untuk menciptakan persepsi ketidakadilan kekuasaan di mata penonton (van Dijk, 1998).

2. Level Mezo: Praktik Produksi dan Krisis Editorial

Level mezo mengkaji proses produksi dan konsumsi pesan (Fairclough, 1995). Kasus TRANS7 mengungkap rapuhnya sistem editorial di televisi nasional. Program "Xpose Uncensored" diproduksi oleh pihak ketiga (rumah produksi/PH), yang sering kali lebih mengutamakan aspek visual dramatis daripada kebenaran jurnalistik (Shoemaker & Reese, 2014). Direktur Produksi TRANS7 mengakui adanya keteledoran dalam menyaring materi dari PH

tersebut, yang menunjukkan lemahnya kontrol internal media terhadap konten yang mereka siarkan.

Proses produksi ini juga dipengaruhi oleh tuntutan ritme kerja jurnalisme televisi yang cepat, sehingga tahap verifikasi dan tabayyun (klarifikasi) sering diabaikan demi menjadi yang pertama dalam menyiarkan konten viral. Kegagalan melakukan cover both sides kepada pihak Pesantren Lirboyo menunjukkan bahwa ruang redaksi tidak lagi berfungsi sebagai filter kebenaran, melainkan sebagai mesin pengganda narasi sensasional (Ward, 2005).

3. Level Makro: Struktur Ekonomi-Politik dan Hegemoni Rating

Pada level makro, teks media dihubungkan dengan konteks sosial-budaya dan struktur ekonomi-politik (Mosco, 2009). Industri televisi Indonesia sangat bergantung pada sistem rating, yang memaksa pengelola program untuk terus memproduksi konten yang memicu emosi publik. Pesantren, sebagai entitas yang dianggap "ekotis" dan "tertutup", menjadi target komodifikasi yang

empuk dalam pasar media yang kompetitif.

Konteks makro ini juga mencerminkan bias Jakarta-sentris yang mendalam. Elit media di Jakarta sering kali memandang dunia luar Jakarta melalui kaca mata "modernitas sekular". Akibatnya, praktik keagamaan tradisional dipandang sebagai "Liyen" yang aneh (Said, 2016). Orientalisme internal ini bekerja dengan cara meminggirkan nilai-nilai lokal-religius dan menggantinya dengan standar global-urban yang sering kali tidak relevan dengan realitas sosiologis di daerah.

Level Analisis CDA Fokus Analisis dalam Kasus Lirboyo Dampak Representasi.

Mikro (Teks) Pilihan kata "ngesot", "amplop", visualisasi subordinasi Reduksi nilai spiritual menjadi anomali perilaku. Mezo (Praktik) Ketergantungan pada PH pihak ketiga, lemahnya sensor internal Erosi etika jurnalistik demi efisiensi produksi. Makro (Sosial) Hegemoni rating, bias urban terhadap komunitas pedesaan Marginalisasi sistem pendidikan asli Nusantara.

Model Encoding/Decoding Stuart Hall

Teori Stuart Hall mengenai encoding dan decoding memberikan kerangka untuk memahami bagaimana audiens memaknai pesan media secara aktif (Hall, 1980). Hall menekankan bahwa makna tidaklah tetap; ia bisa diterima, dinegosiasi, atau ditolak sepenuhnya oleh audiens tergantung pada latar belakang budaya dan ideologis mereka.

1. Encoding Media: Pesan Sensasionalisme Urban Pihak TRANS7 melakukan encoding dengan kode-kode yang berbasis pada nilai-nilai urban-modernitas yang kritis dan skeptis terhadap institusi tradisional (Hall, 1980). Mereka berharap audiens akan menerima pesan tersebut dalam posisi dominan-hegemoni, di mana pemirsa mengamini bahwa pesantren adalah tempat yang bermasalah dan perlu "dibenahi". Dalam posisi ini, media memosisikan dirinya sebagai pembela hak asasi manusia yang membongkar praktik "feodal".
2. Decoding Audiens: Dari Ketaatan hingga Perlawanan Respon terhadap tayangan tersebut menunjukkan

keragaman posisi pembacaan (reading positions) di masyarakat (Hall, 1980). Analisis terhadap aksi santri menunjukkan dominannya pembacaan oposisional (oppositional reading).

Pertama, Posisi Dominan-Hegemonik, Kelompok audiens urban yang jauh dari budaya pesantren cenderung menerima narasi media secara bulat. Bagi mereka, apa yang ditayangkan adalah "kebenaran" jurnalisme investigatif. Kedua, Posisi Negosiasi (Negotiated Reading), Sebagian audiens mungkin mengakui bahwa ada hal-hal di pesantren yang perlu diperbaiki secara administratif, namun mereka menolak cara media yang tidak sopan dalam mengkritik figur Kiai. Ketiga, Posisi Oposisional (Oppositional Reading), Komunitas santri, alumni Lirboyo, dan PBNU mengambil sikap secara kritis menolak seluruh narasi media. Mereka memahami dasar ideologis di balik pesan tersebut sebagai serangan terhadap identitas mereka. Bagi para santri, apa yang dianggap media sebagai "ngesot" adalah bentuk ketaatan tulus demi mendapatkan keberkahan ilmu.

Solidaritas yang ditunjukkan melalui tagar #BoikotTrans7 dan aksi unjuk rasa ribuan santri merupakan manifestasi dari perlawanan terhadap dominasi makna media mainstream. Hal ini membuktikan bahwa audiens pesantren adalah audiens yang aktif dan memiliki literasi media yang cukup untuk melakukan dekonstruksi terhadap pesan yang bias (Hall, 1980).

Posisi Decoding (Hall) Kelompok Audiens Reaksi Terhadap Kasus TRANS7

Dominant-Hegemonic

Masyarakat Urban-Sekular Menyetujui bahwa pesantren bersifat feodal dan tertinggal.

Negotiated Masyarakat Muslim Moderat Memahami kritik media namun menyesalkan cara penyampaiannya.

Oppositional Santri, Alumni, PBNU Menolak total narasi media, menganggapnya sebagai fitnah dan penghinaan.

Analisis Komparatif: Fakta Media vs Realitas Sosiologis Pesantren Ketimpangan representasi ini semakin terlihat jelas ketika kita membandingkan "fakta media" yang dikonstruksi TRANS7 dengan "fakta sosiologis" yang ditemukan dalam

penelitian mendalam tentang pesantren, seperti di Pesantren Langitan, yang membuktikan bahwa hierarki di pesantren bukanlah bentuk penindasan, melainkan mekanisme transmisi ilmu di mana adab (etika) ditempatkan lebih tinggi daripada sekadar transfer informasi (Azra, 2012). Perilaku fisik yang dianggap media sebagai "perbudakan" sebenarnya adalah manifestasi tawadu' untuk mendapatkan barokah ilmu, atau Pesantren An-Nur 2, bahwa disiplin pesantren bersifat edukatif, bukan represif. Misalnya, santri membantu kiai dilakukan secara sukarela sebagai bentuk bakti, bukan karena perintah paksa atau struktur feodal sebagaimana dituduhkan media. Media televisi sering kali hanya mengangkat isu pesantren ketika ada skandal, sementara peran besar pesantren dalam pembangunan karakter bangsa diabaikan.

Pesantren bukanlah institusi statis yang kolot. Secara sosiologis, hubungan Kiai dan santri adalah hubungan pedagogis yang berbasis pada adab, bukan hubungan politik-feodal (Azra, 2012). Kiai dipandang sebagai bapak spiritual yang membimbing santri secara lahir dan batin. Penghormatan dengan berjalan

jongkok adalah bagian dari subbudaya yang memiliki tata nilai berbeda dengan budaya dominan masyarakat sekitarnya. Kegagalan media dalam memahami dimensi metafisik-spiritual ini menyebabkan mereka hanya melihat permukaan fisik dari sebuah perilaku sosial.

Selain itu, tuduhan eksploitasi ekonomi sangat bertentangan dengan realitas kemandirian pesantren. Banyak pesantren yang justru menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui unit-unit usaha mandiri dan pemberian beasiswa bagi santri miskin. Media menggunakan kaca mata materialistik untuk menilai hubungan yang bersifat transendental, sehingga yang muncul adalah distorsi realitas yang sangat merugikan pihak pesantren.

Mitigasi, Sanksi KPI, dan Tanggung Jawab Hukum Reaksi keras dari komunitas pesantren memaksa adanya langkah-langkah mitigasi dan penegakan hukum penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memainkan peran penting sebagai regulator dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap program tersebut karena dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar

Program Siaran (SPS) (KPI, 2025). Sanksi ini merupakan pengakuan formal bahwa kebebasan pers tidak boleh melanggar hak-hak dasar kelompok masyarakat atau merusak marwah institusi pendidikan keagamaan.

Manajemen TRANS7 melakukan langkah-langkah mitigasi melalui permintaan maaf resmi dan kunjungan tabayyun ke Lirboyo. Namun, catatan kritis tetap diberikan terhadap proses produksi yang melibatkan pihak ketiga. Lemahnya kontrol editorial terhadap rumah produksi menunjukkan adanya celah etika dalam bisnis penyiaran di Indonesia. Tanggung jawab media bukan hanya pada level permintaan maaf setelah terjadi kegaduhan, tetapi pada level pencegahan melalui riset yang mendalam dan sensitivitas budaya sebelum konten ditayangkan.

D. Kesimpulan

Analisis terhadap kontroversi TRANS7 dan representasi pesantren mengungkapkan adanya krisis etika dan epistemologis dalam jurnalisme televisi Indonesia. Penggunaan analisis framing Robert Entman menunjukkan bagaimana media secara sistematis menyeleksi aspek-

aspek "ganjil" dari kehidupan pesantren untuk membingkainya sebagai masalah moral dan feodalisme demi kepentingan rating (Entman, 1993). Melalui kacamata Analisis Wacana Kritis, terlihat jelas bahwa bias orientalisme internal mengakar kuat dalam pilihan diksi yang ofensif pada level mikro, lemahnya pengawasan editorial pada level mezo, dan hegemoni ekonomi-politik media pada level makro (Fairclough, 1995; Mosco, 2009).

Meskipun demikian, respon aktif dari komunitas pesantren yang melakukan pembacaan oposisional (Oppositional Reading) sesuai teori Stuart Hall menunjukkan adanya pergeseran kekuatan informasi (Hall, 1980). Audiens pesantren telah mampu menggunakan kanal digital untuk melawan dominasi narasi media besar. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi industri televisi nasional bahwa pesantren adalah pilar moral bangsa yang tidak boleh dijadikan sekadar komoditas hiburan yang sensasional. Reformasi etika penyiaran di Indonesia menuntut pergeseran paradigma dari jurnalisme yang mengejar viralitas menuju jurnalisme yang menghormati keragaman budaya dan menjunjung

tinggi kebenaran sosiologis. Hanya dengan menghapus bias orientalisme inilah, media massa dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendidikan publik yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of religious life*. Free Press.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. Edward Arnold.
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, media, language* (pp. 128–138). Routledge.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Heryanto, A. (2015). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. NUS Press.
- KPI. (2025). *Sanksi terhadap program siaran "Xpose Uncensored" TRANS7*. Komisi Penyiaran Indonesia.
- McManus, J. H. (1994). *Market-driven journalism: Let the citizen beware?* Sage Publications.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Mosco, V. (2009). *The political economy of communication* (2nd ed.). Sage Publications.
- Said, E. W. (2016). *Orientalism*. Penguin Books.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (3rd ed.). Routledge.
- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. Sage Publications.
- Ward, S. J. A. (2005). *The invention of journalism ethics: The path to objectivity and beyond*. McGill-Queen's University Press.
- PBNU. (2025). *Pernyataan resmi terkait tayangan TRANS7*. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- MUI. (2025). *Sikap Majelis Ulama Indonesia terhadap konten siaran televisi*. Majelis Ulama Indonesia.
- Himasal. (2025). *Pernyataan sikap alumni Pesantren Lirboyo*. Himpunan Alumni Santri Lirboyo.